



APBD 2023 Mulai Dibahas

PUTUSSIBAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu bersama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023. Senin (14/11), Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2023 di ruang sidang Gedung DPRD Kapuas Hulu.

Adapun rincian APBD tahun 2023 mencakup total anggaran pendapatan sebesar Rp1,618 triliun lebih dan total anggaran belanja Rp1,638 triliun lebih. Kemudian pembiayaan Rp30 miliar yang dimanfaatkan dana sisa lebih anggaran tahun 2022, serta pengeluaran pembiayaan Rp10 miliar untuk penyetaraan modal pada Bank Kalbar Putussibau.

Bupati Fransiskus Diaan mengatakan bahwa penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD adalah kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pemerintah dan DPRD Kapuas Hulu. Hal itu, menurut dia, merupakan bagian dari tahapan dalam lingkup sistem pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan, agar pengelolaan menjadi optimal, transparan dan akuntabel.

"APBD ini disusun berdasarkan sinergitas dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati sebelumnya dan berpedoman pada RKPD tahun anggaran 2023," jelas Bupati.

Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-173/PK/2022 tentang pencapaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2023, Bupati mengatakan bahwa kewajiban seluruh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyesuaikan prioritas sebagaimana dalam dana alokasi umum yang telah ditentukan peruntukannya pada APBD Tahun 2023.

"Penekatan prioritas pada bidang pendidikan lebih besar dibandingkan bidang pekerjaan umum dan kesehatan," tegasnya. Ketentuan DAU tersebut, ditegaskan dia, bersifat wajib dan mengikat bagi pemerintah daerah. Bila itu tidak dilaksanakan maka diingatkan dia, akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU di tahun 2023.

Lebih lanjut Bupati merinci,



PROKOPIM FOR PONTIANAK POST

PENYERAHAN DRAF: Bupati Fransiskus Diaan menyerahkan draf Raperda APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Kapuas Hulu, Senin (14/11).

untuk alokasi transfer pusat ke daerah tahun 2023 sebesar Rp1.494.998.138.000, yang memiliki ketentuan berbeda dengan tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut, dijelaskan dia, terdapat pada dana alokasi umum yang telah memiliki peruntukan spesifik.

Untuk Alokasi TKDD tahun 2023 dijabarkan Bupati terdiri dari dana transfer umum sebesar Rp999.492.648.000 yang terdiri atas, dana bagi hasil se-

sar Rp75.213.933.000, dan DAU sebesar Rp924.278.715.000. Kemudian, dia menambahkan, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp639.972.953.000, dan DAU yang sudah ada peruntukannya sebesar Rp284.305.762.000, terdiri atas penggantian untuk formasi PPPK pengangkatan tahun 2023 sebesar Rp35.343.414.000, pendanaan untuk kelurahan sebesar Rp800.000.000. Untuk Bidang pendidikan, disebutkan

dia, sebesar Rp140.686.661.000, bidang kesehatan sebesar Rp46.600.713.000, dan bidang pekerjaan umum sebesar Rp60.874.974.000. Hadir dalam paripurna tersebut Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat serta jajaran Forkopimda Kapuas Hulu, jajaran DPRD Kapuas Hulu, OPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, serta BUMD dan BUMD di Kapuas Hulu. (dRe)